



LAYANAN PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI ARAB SAUDI *EDUCATIONAL SERVICES FOR INDONESIAN CITIZENS DOMICILED IN SAUDI*

Muhamad Murtadlo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI.

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

email: tadho25@gmail.com

Naskah Diterima: 22 Maret 2018; Direvisi: 10 April 2018; Disetujui: 29 April 2018

Abstract

Nowadays many Indonesian citizens work in Saudi Arabia and send their children to school in the country. Many are also prospective students seeking scholarships in Saudi Arabia. This study will examine how the actual form and practice of educational services for Indonesian citizens in Saudi Arabia and how the implications of such education services for Indonesia. The research was conducted by qualitative method through literature study and visitation. The study found that education services for Indonesian citizens in the country are still below expectations and in some ways below the standard. In addition, from the graduates there is a tendency to develop a certain religious understanding that is somewhat different from the needs of moderate Islamic development (wasatiyah) in Indonesian country.

Keywords: *Anticipation; Education services; Salafy*

Abstrak

Hari ini banyak Warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Arab Saudi dan menyekolahkan anaknya di negeri tersebut. Banyak juga para calon mahasiswa yang mencari beasiswa pendidikan di Arab Saudi. Penelitian ini iningi mengkaji bagaimana sebenarnya bentuk dan praktek layanan pendidikan bagi anak WNI di Arab Saudi dan bagaimana implikasi layanan pendidikan tersebut bagi Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui kajian kepustakaan dan visitasi. Penelitian menemukan bahwa layanan pendidikan bagi WNI di negeri tersebut masih dibawah ekspektasi dan dalam beberapa hal di bawah standar. Di samping itu dari lulusannya ada kecenderungan mengembangkan paham keagamaan tertentu yang agak berbeda dengan kebutuhan pengembangan Islam moderat (wasatiyah) di Indonesia.

Kata kunci: Antisipasi; Layanan Pendidikan; Paham Salafy

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, para ulama Indonesia banyak dihasilkan dari proses pendidikan keagamaan yang ada di Masjid Haromain di Arab Saudi seperti Nawawi Al Bantani, Khalil Bangkalan, Akhmad Khatib Al Minangkabau, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dhalan dan banyak lagi. Mereka pergi ke Saudi untuk menunaikan Haji dan belajar melalui halaqah-halaqoh yang diasuh oleh ulama-ulama yang berasal dari berbagai negeri. Munculnya paham wahabi, dan pendekatan pemerintah Saudi yang mengikuti pola pemahaman wahabi yang cenderung puritan (mazhab Wahabi setelah tahun 1924) memunculkan kekhawatiran para alumni dari Arab Saudi menjauh dari lahirnya ulama yang faqih di bidang agama dan toleran (tasamuh) yang tinggi dalam mensikapi perbedaan. Peran-peran tradisional reproduksi ulama yang elama ini dihaikan oleh pendidikan traditional di Arab Saudi seperti Rubath tergantikan dengan lembaga pendidikan formal. Sejumlah regulasi di Arab Saudi menyebabkan pendidikan agama Islam, khususnya dalam konteks tradisionalisme Islam yang ramah terhadap budaya lokal, kurang berkembang atau malah mati.

Dalam tiga dekade akhir ini terlebih setelah tumbangnya rezim orde baru, Irham menyoroti adanya arus baru pendidikan Islam, yaitu dengan berkembangnya lembaga pendidikan bercorak salafi.¹ Mengutip Norhaidi, perkembangan arus ini cukup masif. Perkembangannya merupakan representasi dari dampak Islam arus global (gerakan salafis) yang tidak terlepas dari kontroversi dengan masyarakat sekitar. Masalah kontroversinya karena gerakan tersebut termasuk juga pesantren ber-manhaj salafi tumbuh berkembang dengan corak sebagai pendidikan Islam yang eksklusif yang kurang akomodatif dengan budayamasyarakat. Tumbuhnya gerakan salafi dan pesantren ber-manhaj salafi misalnya, munculnya Dewan Dakwah Islam Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA), gerakan aktivis Islam kampus, berdirinya pesantren al-Irsyad Tangerang, dan lain

sebagainya, yang sering berseberangan pandangan dan budaya dengan masyarakat. Munculnya gerakan tersebut berupaya mengembangkan ideologi manhaj salafi yang kurang akomodatif dengan kondisi sosio-kultur/sosio-historis masyarakat sehingga gerakan salafi ini kerap menimbulkan konflik masyarakat.²

Kecenderungan umum yang terjadi, orang Indonesia pergi ke Saudi hanya untuk tiga kepentingan, yaitu menjalankan Haji sebagai prasyarat memenuhi rukun Islam, memperdalam ilmu agama dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ada opini yang berkembang bahwa fungsi Arab Saudi sebagai pusat pengembangan pendidikan Islam cenderung tidak sesuai harapan dan kebutuhan ulama yang berwawasan keindonesiaan. Pendidikan di Saudi cenderung melahirkan agamawan yang puritan, dan tidak menutup kemungkinan menjadi wahabi. Indonesia sulit berharap lagi lahir ulama sesuai dengan kebutuhan Islam keindonesiaan dari rahim pendidikan negara Arab Saudi.

Pada tahun 2015, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI melakukan penelitian tentang layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Salah satu tujuan yang dipilih adalah Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan di Arab Saudi. Arab Saudi dipilih karena: 1) Arab Saudi merupakan salah satu negara penampung TKI terbesar, di mana diasumsikan di sana terdapat keluarga dan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan agama dan keagamaan; 2) Arab Saudi sebagai negara tujuan umat Islam seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji dan dalam sejarahnya Arab Saudi dipahami juga sebagai pusat transmisi pengetahuan Islam; 3) Arab Saudi yang dinilai mempunyai paham keagamaan wahabi sebagai cara pandang mainstream dinilai mempunyai pengaruh tertentu dalam layanan pendidikan yang secara langsung dan tidak langsung akan dibawa pengaruhnya ke Indonesia.

¹Irham, 2016. Pesantren Manhaj Salafi: Pendidikan Islam Model Baru di Indonesia. *Ulul Albab*, Volume 17, No.1.

²Noorhaidi Hasan. 2005. Laskar Jihad Islam, Militancy and The Quest for Identity in Post-New Order Indonesia. Ph.D. Dissertation. Utrecht university, h. 23-84

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana layanan pendidikan Agama dan Keagamaan yang dinikmati oleh masyarakat WNI di Arab Saudi, serta bagaimana model yang dihasilkan dari kebijakan pendidikan di Arab Saudi; 2) apa yang perlu dilakukan Kementerian Agama dalam rangka memberikan hak warga negara di bidang pendidikan dan usaha memajukan pendidikan di Arab Saudi agar sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia bernegara.

Penelitian ini mempunyai manfaat besar bagi para pengkaji tingkat layanan pendidikan bagi WNI di luar negeri dan implikasi pendidikan luar negeri dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Beberapa manfaat itu antara lain: 1) mengetahui permasalahan layanan pendidikan bagi WNI di Arab Saudi. Apakah layanan yang diberikan pemerintah Indonesia di Arab Saudi sudah memenuhi standar pendidikan yang digariskan oleh negara; 2) mengetahui kebijakan pendidikan pemerintah Arab Saudi dalam memberikan layanan pendidikan kepada warga asing, termasuk warga negara Indonesia; 3) mengetahui potensi dampak paham keagamaan yang diterima WNI selama studi di Arab Saudi hubungannya ketika mereka kembali ke Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara visitasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan seleksi untuk dideskripsikan sedemikian rupa untuk membentuk konstruksi pengetahuan tentang layanan pendidikan bagi warga Indonesia di Arab Saudi dan implikasi paham keagamaan yang dihasilkan dari layanan pendidikan di negara tersebut.

Dari judul tulisan ini, ada dua konsep kunci yang akan dieksplorasi dalam tulisan ini: pertama tentang layanan pendidikan, kedua tentang dampak tertentu dari layanan pendidikan di Arab Saudi dalam konteks ideology terhadap lulusan pendidikan Arab Saudi. Terkait dengan konsep layanan pendidikan, Nurhasyim menyebut beberapa perilaku pelayanan prima pada sektor publik meliputi: 1) Pelayanan yang terbaik dari

pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa; 2) Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan; 3) Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal; 4) Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas masyarakat eksternal dan internal. Dari rujukan ini, kajian ini akan melihat bagaimana layanan pendidikan yang tersedia bagi para WNI di Arab Saudi.³

Terkait konsep kedua, yaitu dampak tertentu dari layanan pendidikan dikaitkan dengan paham/ideology yang dianut pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia. Dengan berkembangnya ancaman gerakan terorisme dan radikalisme global yang dikaitkan dengan fenomena keagamaan, salah satu yang menjadi sorotan adalah paham di Arab Saudi adalah paham Salafi-Wahabi. Paham ini oleh beberapa pihak belakangan dianggap menjadi salah satu sumber ideologi yang potensial mengenalkan kekerasan. Karakter eksklusif, kaku, dan militan yang dimiliki paham ini dianggap bisa menginspirasi siapa saja untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan untuk melawan siapa saja yang dianggap musuh, baik sesama muslim, terlebih non-Muslim atau kafir.⁴ Dari gambaran dampak negative paham wahabi seperti itu, kurang lebih bagaimana pemerintah Indonesia mengantisipasi hadirnya para alumni pelajar dan mahasiswa dari Arab Saudi nantinya.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan deskripsi pendidikan di Arab Saudi yang pernah dilakukan diantaranya adalah kajian yang dilakukan *Centre for Religious Freedom*, sebuah lembaga yang menekuni bidang kebebasan beragama di Amerika Serikat, mengeluarkan hasil penelitian mereka, tentang kurikulum dan buku-buku yang diajarkan di sekolah-sekolah Arab Saudi. Salah satu temuan penting penelitian itu adalah bahwa kurikulum dan buku-buku Islam yang

³Nurhasyim. 2004. *SESPANAS LAN*

⁴Hasbi Anwar. 2016. *Politik Luar Negeri Arab Saudi Dan Ajaran Salafi-Wahabi Di Indonesia. Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations*. Volume 1, Agustus. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia.

diajarkan sekolah-sekolah Arab Saudi penuh dengan kebencian dan permusuhan terhadap agama Yahudi, Kristen, dan kaum Muslim yang tak sepaham dengan ajaran Wahabi.

Hasil penelitian di atas disanggah oleh Ahmad Zainudin dalam tulisannya “Perbandingan Pendidikan Antara Arab Saudi Dan Pakistan.” Tulisan ini menjelaskan bahwa Pemerintah Saudi menurutnya sudah menjalankan apa yang sudah tersurat di nash al Qur’an dan Hadits. Tulisan itu juga menambahkan bahwa pemerintah Saudi saat ini bahkan telah berusaha menanggung sepenuhnya tanggung jawab di bidang pendidikan. Banyak program di bidang pendidikan yang dikerjakan oleh pemerintah Arab Saudi diantaranya mendirikan sekolah-sekolah tinggi di berbagai negara Islam dan kota internasional tertentu, Memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim untuk studi di Arab Saudi, Pengiriman dosen-dosen ke perguruan tinggi di berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim, Mendirikan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di berbagai negara dan kota besar dunia.⁵

Kajian ini mencoba mendeskripsikan tentang layanan pendidikan, khususnya bagi warga Indonesia di Arab Saudi. Apakah gambaran negeri dengan julukan petrodolar telah memberikan layanan pendidikan yang layak dan memadai terhadap WNI atau ada gambaran lain. Di samping itu, kajian ini juga akan membahas tentang implikasi layanan pendidikan di Arab Studi, terkait dengan dengan penyebaran paham keagamaan tertentu, sebagaimana diketahui bahwa negara Arab Saudi menganut paham wahabi. Paham wahabi di Indonesia hari ini dipahami sebagai paham yang mengajarkan gerakan pemurnian agama (puritanisme) yang terkesan hitam putih dalam melihat permasalahan. Dalam banyak hal, pendekatan hitam putih ini dipandang kurang cocok dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Kita mengakui bahwa pengaruh Kebudayaan Arab Saudi dalam kehidupan

masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia sangat besar. Salah satunya dalam bidang pembangunan Bahasa Indonesia, pengaruh bahasan Arab sungguh sangat besar. Menurut menurut hasil riset Alm. Prof. Soedarno, tidak kurang dari 13% kosakata bahasa Indonesia itu diserap (dipinjam dan diadaptasi) dari bahasa Arab, tidak hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga dalam bidang sosial, politik, hukum, budaya, dan ekonomi syariah.⁶

Dady Hidayat menyebutkan perkembangan gerakan dakwah salafi di Indonesia pada era reformasi ini juga secara penuh ditopang oleh jaringan sosial yang dibangun sejak Orde Baru. Jaringan ini memberikan dukungan berupa pendidikan baik di dalam negeri, yakni di LIPIA, maupun di Arab Saudi, yakni di Universitas Islam Madinah atau Universitas Muhammad bin Su’ud, Riyadh. Upaya ini berhasil dengan lahirnya tokoh-tokoh salafi yang menyokong perkembangan gerakan dakwah Salafi di Indonesia pada era reformasi.⁷ Terlepas beberapa kajian di atas, tulisan ini mencoba membaca tingkat layanan pendidikan agama dan keagamaan bagi warga Indonesia di Arab Saudi dan juga berusaha mengkritisi dampak kebijakan layanan pendidikan pemerintah Arab Saudi terhadap paham keagamaan yang diperoleh para pelajar/mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi.

Secara konseptual membahas tentang layanan, layanan public dianggap baik, menurut Parasuraman et al., (1988) bila memenuhi beberapa dimensi, yaitu: 1) Reliability (Keandalan) atau kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat; 2) responsiveness (Daya tanggap), yakni kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat; 3) Assurance (Jaminan) meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan

⁶Muhbib Abdul Wahab. 2015. *Masa Depan Bahasa Arab di Indonesia*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28591>

⁷Dady Hidayat, Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 17 No. 2, juli 2012.

⁵Ahmad Zainudin, “Perbandingan Pendidikan Antara Arab Saudi Dan Pakistan.” <http://datarental.blogspot.com/2008/04/perbandingan-pendidikan-antara-saudi.html>. Akses 9 Desember 2015

kepercayaan dan keinginan; 4) Empathy (Empati), mencakup menjaga dan memberikan tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen; 5) Tangible (Bukti langsung) yang meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga, dan penampilan personal dan material tertulis.⁸

Mengingat Arab Saudi adalah negeri yang sangat kaya minyak dan mempunyai kepentingan mengajarkan agama melalui pendidikan secara baik, maka penulis berhipotesa layanan pendidikan di negara itu baik yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi secara langsung maupun kebijakan politik terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh negara luar akan memberikan layanan pendidikan secara baik pula. Asumsi ini mempunyai harapan bahwa menikmati layanan pendidikan di Arab Saudi akan sangat menguntungkan bagi WNI baik yang kebetulan bekerja di sana atau para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sana. Bagaimana kenyataannya? Maka penelitian ini menjadi penting untuk melihat praktek layanan pendidikan di Arab Saudi yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

WNI di Saudi Arab

Ada banyak warga negara Indonesia di Arab Saudi. Menurut data BI (BI) yang dikutip detikFinance, ada setidaknya 1,3 juta TKI yang berada di Timteng per akhir tahun 2014. Negara paling besar menampung TKI adalah Arab Saudi dengan jumlah TKI 1,01 juta orang. Kemudian Uni Emirat Arab sebesar 114.000 orang, Yordania 48.000 orang, Oman 33.000 orang dan Qatar 28.000 orang. Sisanya adalah Kuwait, Bahrain, Sudan dan negara lainnya. Konsentrasi WNI terbesar berada di kota Jeddah, diikuti Makkah, Riyadh dan kota-kota lainnya. Darmakirty Syailendra, Kepala Konjen Republik Indonesia di Jeddah,

menambahkan secara resmi TKI yang terdaftar di daerah Jeddah kurang lebih 427 ribu WNI.⁹

Dari sisi asal WNI, sebagian besar WNI di Arab Saudi adalah dari latar belakang kesukuan Madura, diikuti Sunda, Banjar dan Palembang. Jumlah terbesar adalah suku Madura. Menurut Kepala Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Masduki, dari murid yang terdaftar di SIJ, anak-anak dari suku Madura mendominasi jumlahnya, yaitu kurang lebih 90 %. Ini menjadi bukti bahwa sebagian besar TKI di Saudi adalah dari suku Madura. Ini belum termasuk WNI yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Arab.

Saat ini WNI di Saudi dilayani oleh lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh warga Indonesia maupun yang didirikan oleh warga negara asing. Ada tiga jenis lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh masyarakat asing di Arab Saudi, yaitu sekolah kedutaan (*Embassy School*), sekolah internasional (*International School*), dan sekolah Komunitas (*Community School*). Dari tiga jenis lembaga pendidikan tersebut, Indonesia baru memiliki lembaga pendidikan dalam jenis sekolah kedutaan (seperti SIJ, SIM, SIR) dan sekolah komunitas (Seperti Sekolah Darul Ulum di Jeddah).

Sementara itu dari sisi layanan pendidikan yang diberikan pemerintah dan masyarakat Arab Saudi meliputi pendidikan formal dari dasar hingga perguruan tinggi, demikian juga pendidikan nonformal. Pemerintah Arab Saudi sejak tahun 1970-an telah memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa dari Indonesia. Lima tahun terakhir, malahan pemerintah Arab Saudi memberikan beasiswa setiap tahunnya sekitar kurang lebih 100-170 anak mahasiswa. Saat ini ada sekitar 800-an mahasiswa Indonesia penerima beasiswa di Arab Saudi. Mereka tersebar di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Madinah, Universitas Ummul Qurra di Makkah, Universitas Riyadh.

Layanan Pendidikan WNI Di Arab Saudi

Masyarakat Indonesia atau WNI di Arab Saudi menikmati pendidikan baik yang

⁸Parasuraman, et al. (1998). Service quality : A multiple item scale for measuring consumer perception of service quality

⁹1,3 Juta TKI Kerja di Timteng, Terbanyak Arab Saudi. <http://finance.detik.com/read/> akses 9 Desember 2015

disediakan oleh komunitas WNI atau perwakilan pemerintah RI maupun yang disediakan pemerintah Arab Saudi. Layanan pendidikan yang dimiliki serta diselenggarakan oleh masyarakat atau perwakilan pemerintah RI saat ini tercatat 5 lembaga pendidikan, yang terdiri 4 lembaga pendidikan formal dan satu lembaga pendidikan keagamaan. Keempat lembaga pendidikan formal itu meliputi Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Sekolah Indonesia Mekkah (SIM), Sekolah Indonesia Riyadh (SIR), Sekolah Darul Ulum Jeddah. Adapun satu lembaga pendidikan nonformal adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan An Nasiriyah di Jeddah.

Dari sisi jumlah siswa, jumlah terbesar terdapat di Sekolah Indonesia Jeddah yang mempunyai siswa sebanyak 1400 siswa. Sementara di Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) sebanyak 310 siswa, Sekolah Indonesia Mekkah (SIM) sebanyak 481 anak, Sekolah Darul Ulum di Jeddah sebanyak 193 anak. Sedangkan untuk layanan pendidikan keagamaan di TPA An Nasiriyah Jeddah terdapat murid sebanyak 400 anak.

Bagaimana deskripsi singkat layanan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang melayani langsung warga negara Indonesia, mari kita lihat masing-masing kasusnya:

1. Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ)

Sekolah ini mulai didirikan pada tahun 1964 yang bermula dari kegiatan Darma Wanita pegawai Konjen RI di Jeddah. Lembaga pendidikan ini beralamatkan di Jalan Al Mualifin, Al Rehab, District 5 Jeddah. Berawal dari lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), saat ini telah berkembang menjadi empat jenjang yaitu TK, SD, SMP, dan SMA. Menempati lokasi seluas 1200 m², keadaan gedung ini terasa padat untuk melayani siswa yang ada. Saat ini menampung siswa sebanyak 1400 anak.

Dengan murid sebanyak 1400 anak, sekolah ini mempunyai guru sebanyak 36 orang yang bertugas sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk melayani semua jenjang sekolah. Dari total guru SIJ, yang berstatus PNS hanya dua orang. Permasalahan yang dirasakan SIJ adalah

kurangnya guru dan keterbatasan kapasitas Gedung dalam melayani pendidikan.

2. Sekolah Indonesia Riyadh (SIR)

Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) ini beralamatkan di Jalan Prince Amer Nawal Ibn Abdul Aziz, Um-Al Hamam Gharby, Riyadh. Lembaga ini digagas oleh KBRI Riyadh dan mulai berdiri tahun 1985. Sekolah ini merupakan pecahan Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) di mana dulu KBRI Arab Saudi berpusat di Jeddah. Namun sejak tahun 1985, KBRI berpindah ke Riyadh, maka di Riyadh pun dibuat sekolah Indonesia sebagai perkembangan dari sekolah Indonesia Jeddah. Maka tidak heran antara SIJ dan SIR sama-sama mengaku Sekolah Indonesia yang pertama di Arab Saudi.

Sekolah ini terdiri dari empat jenjang yaitu Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA. Jumlah keseluruhan murid pada tahun 2015 sebanyak 310 anak. Jumlah di SIR ini mengalami pasang surut karena mengikuti jumlah pegawai KBRI yang di Riyadh. Kondisi SIR ini berbeda dengan Sekolah Indonesia yang ada di Jeddah dan Mekkah, di mana banyak warga Indonesia yang banyak tinggal di kedua kota tersebut. Ini mudah dipahami karena kebanyakan WNI lebih suka mendekatkan diri dengan kedua Kota Suci yaitu Makkah al Mukaromah dan Madinah Al Munawaroh.

3. Sekolah Indonesia Mekkah (SIM)

Sekolah Indonesia Mekkah berdiri 17 Juli tahun 2000, SIM Makkah awalnya berstatus swasta murni di bawah pengelolaan Yayasan Al Ma'arif, namun dengan semakin ketatnya peraturan ketenaga kerjaan dan status izin tinggal di Arab Saudi, serta tuntutan biaya operasional yang tinggi, maka sejak 7 April 2013 disepakati pengelolaan dan pembinaan diserahkan ke KJRI Jeddah mengikuti SILN lainnya. Lembaga pendidikan ini terdiri dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Saat ini total murid dari semua jenjang sebanyak 481 anak. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dikelola oleh tenaga pendidik sebanyak 26 guru.

Permasalahan yang dihadapi sekolah ini, sama dengan yang sekolah Indonesia di Jeddah yaitu Pemenuhan guru. Ketatnya peraturan

untuk menghadirkan guru dari tanah air terkait visa kerja menyebabkan guru hanya direkrut dari WNI yang ada di Mekkah dan sekitarnya. Hingga saat ini, Sekolah Indonesia Mekah (SIM) belum mempunyai guru yang berstatus sebagai PNS. Persoalan lain yang dirasakan adalah pengadaan buku ajar. Buku tidak boleh dikirim langsung dari Indonesia. Setiap buku yang dikirim dari Indonesia akan diseleksi secara ketat. Maka untuk mensiasati itu, buku ajar yang digunakan adalah fotocopy buku-buku pelajaran yang berhasil dibawa oleh guru dari tanah air. Artinya tidak ada buku cetak dalam jumlah yang banyak.

4. Sekolah Darul Ulum Jeddah

Lembaga Pendidikan ini didirikan oleh Ibu Dr. Ely Maliki, alumnus dari Universitas Al Azhar Cairo. Sekolah ini didirikan pada tahun 2007, dan hingga kini telah meluluskan dua angkatan. Sekolah ini oleh pendirinya digagas untuk menjadi lembaga pendidikan komunitas. Saat ini murid sekolah ini tercatat sebanyak 193 anak.

Hanya saja lembaga pendidikan ini saat ini sedang terhenti karena tersandung masalah yaitu izin operasional yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Saudi. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Saudi adalah masalah kelayakan bangunan. Untuk beroperasi kembali, sekolah ini perlu dukungan diplomasi dan penyediaan sarana prasarana dari Pemerintah RI.

Sebenarnya dalam rangka menghadapi masalah ini, pihak KJRI di Jeddah pernah menawarkan agar Sekolah Darul Ulum ini bergabung saja dengan Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) atau menjadi kelas jauhnya SIJ. Namun pihak sekolah Darul Ulum berkeberatan karena dengan bergabung dengan SIJ, maka sekolah Darul ulum akan menjadi sekolah umum. Padahal Sekolah Darul Ulum di Jeddah ini digagas untuk membuat sekolah dengan kurikulum yang seimbang antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Pendeknya mereka ingin membuat sekolah Islam.

Menurut ibu Eli Maliki, sekolah Darul Ulum dikelola dengan model Sekolah Islam Terpadu sebagaimana SDIT, SMPIT yang terdapat di Indonesia, yang dikembangkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI; atau malah dikelola sebagaimana madrasah di tanah air yang dibina oleh Kementerian Agama RI.¹⁰

5. Sekolah Keagamaan TPA An Nasiriyah Jeddah

Sekolah Keagamaan An Nasiriyah adalah lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang berada di Jeddah. Lembaga ini mulai berdiri pada tahun 1993. Saat ini TPA An Nasiriyah mempunyai anak didik sebanyak 400 siswa yang terdiri dari 16 rombongan belajar. Lembaga ini beroperasi hanya didasari oleh semangat pengelola untuk memberikan pendidikan agama untuk anak Indonesia. Status hukum lembaga ini memang belum dipayungi oleh kekuatan hukum yang jelas.

TPA an Nasiriyah membutuhkan advokasi dan dukungan pemerintah Indonesia untuk kenyamanan operasional kegiatan pendidikan Keagamaan di Saudi. Permasalahan yang paling dirasakan adalah status legalitas yang masih dipertanyakan dan prasarana Gedung yang kurang memadai. Padahal banyak warga WNI sangat bergantung pada lembaga pendidikan ini untuk anak-anak mereka.

6. Rubath Al Jawi

Rubat adalah sebutan untuk pondokan. Rubat Al Jawi berada di daerah Misfalah Mekkah. Rubath adalah pondokan bagi santri-santri yang berasal dari Indonesia yang telah melahirkan ulama-ulama nusantara. Dahulu banyak rubat Indonesia di Mekah seperti Rubat Jawa, Rubat Medan, Rubat Lombok. Rubat-rubat itu awalnya adalah dibangun di atas tanah wakaf orang-orang keturunan Indonesia yang di Saudi. Namun seiring perjalanan waktu lokasi-lokasi rubat itu telah tergusur oleh pembangunan sehingga jumlah rubat itu tinggal sedikit. Salah satunya Rubat Al Jawi. Para santri ini belajar pada ulama perorangan seperti pada Syeh Ahmad Maliki, Syeh Abbas bin Alawy Al-Maliki, dan Syeh Muhammad Ismail Zein maupun belajar di perguruan Saulatiyah.

¹⁰Wawancara dengan ibu Ely Maliki, Kepala Sekolah Darul Ulum Jeddah pada tanggal 6 Desember 2015.

Mereka para ulama itu selama di Saudi kebanyakan tinggal di rubath-rubath. Dahulu konon menurut cerita salah santri di Rubath Al Jawi di sekitar Misfalah Mekkah, Indonesia mempunyai banyak rubath sesuai dengan daerah asal para santri. Namun sekarang rubath-rubath itu jumlahnya sudah berkurang karena proses pembangunan yang dilakukan Saudi. Beberapa rubath itu, sekalipun awalnya dibangun di atas tanah wakaf warga Arab keturunan Indonesia, namun karena kepentingan nasional Saudi di dalam negeri, maka beberapa rubath terpaksa lepas dan diganti dengan pembayaran uang.

Rubath-rubath yang sampai saat ini masih eksis diantaranya adalah Rubath al Jawi di Misfalah, Rubath Lombok di Kongkar, dan Rubath Mandailing di Hafair. Diskusi dengan santri-santri Rubath Al Jawi Misfalah seperti Ahmad Ridho dkk di salah satu rubath yang terisa, yaitu rubath Al Jawi di Misfalah menjelaskan bahwa keberadaan rubath-rubath ini juga bila tidak ada advokasi khusus tidak menutup kemungkinan juga bisa ditutup atas nama pembangunan nasional. Yang jelas saat ini penghuni rubath-rubath ini jumlahnya menurun. Contoh di Rubath Al Jawi di tahun 2012 jumlah santri yang tinggal di rubath ada 50 santri, sekarang tinggal 15 santri. Hal ini terjadi karena para santri susah mendapatkan visa tinggal di Saudi dalam rangka menjadi santri. Para santri terpaksa mencari visa dengan tujuan visa kerja.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi di Bidang Pendidikan

Pemerintah Arab Saudi menjadikan Islam sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Islam menjadi panduan legitimasi dari setiap aktifitas berbangsa dan bernegaranya. Konstitusi negara Arab Saudi adalah Islam, bahkan benderanya pun bertuliskan lafadz tauhid dan pedang sebagai simbol jihad. Tauhid bermakna bahwa Saudi menjadikan Islam sebagai nafas hidupnya dan Jihad sebagai simbol perjuangan untuk memperjuangkan atau membela agama Islam. Dalam website kementerian luar negeri Saudi disebutkan bahwa Islam menempati posisi penting dan berpengaruh dalam politik luar negeri Arab Saudi. Bahkan, menurut Arab Saudi, negara ini sejak berdiri hingga saat ini

telah mencurahkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk ikut terlibat dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di dunia Islam untuk meraih solidaritas dan persatuan umat Islam berdasarkan kesamaan aqidah (Hasbi Anwar: 2016, Vol 1).

Pemerintah Arab Saudi di bidang pendidikan telah banyak membuat program yang dikerjakan oleh pemerintah seperti: 1) Mendirikan sekolah-sekolah tinggi di berbagai negara Islam dan kota internasional terutama negara yang minoritas muslim, seperti lembaga: Kuliyyah Syari'ah dan Bahasa Arab di Emirat Arab; Lembaga Pengetahuan Islam Dan Arab di Washington; Akademi Islam di Washington berdiri pada tahun 1984; Ma'had Islami di Senegal; 2) Memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Arab Saudi. 3) Pengiriman dosen-dosen untuk perguruan tinggi di berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim; 4) Mendirikan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di berbagai negara dan kota besar dunia, terutama negara yang minoritas muslim. jumlahnya mencapai sekitar 210 buah, diantaranya: Islamic Centre Abuja di Nigeria; Islamic Centre Raja Syah di Bangladesh; 5) Mengirim dosen-dosen universitas ke berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim, untuk mengadakan daurah-daurah ilmiah (Kajian Islam Intensif).¹¹

Mengutip paparan Hasbi Anwar, Di Asia, Arab Saudi menduduki posisi ke dua sebagai penyumbang donasi terbesar di dunia. Antara tahun 1973-1991 saja, Saudi telah menyumbang sekitar 60 juta dolar ke negara-negara berkembang dan pada tahun 1994, sudah mencapai 106 juta dolar ke negara-negara Muslim dan 14,6 juta dolar ke negara-negara yang lain. Sebagian dari donasi Saudi itu digunakan untuk mendukung aktifitas dakwah Islam di negara-negara Muslim seperti dukungan kepada madrasah, organisasi dakwah, dan sekolah-sekolah tinggi Islam lainnya. Disebutkan, jutaan dolar telah digelontorkan Arab Saudi untuk merekrut para

¹¹Ahmad Zainudin, "Perbandingan Pendidikan Antara Arab Saudi Dan Pakistan." <http://datarental.blogspot.com/2008/04/perbandingan-pendidikan-antara-saudi.html>. Akses 9 Desember 2015

pelajar untuk mengisi 1.500 masjid, 210 Islamic center, 202 perguruan tinggi Islam dan 2.000 madrasah, serta menempatkan di lembaga-lembaga tersebut sekitar 4.000 pendakwah di berbagai belahan dunia, Asia Tengah, Selatan dan Asia Tenggara serta Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Saudi juga menjadi penyumbang terbesar 4 per 5 dari jumlah keseluruhan percetakan buku Islam secara global (Hasbi Anwar: 2016, Vol 1).

Masih dalam paparan hasbi, Untuk mencetak para pelajar atau para muballigh yang akan berdakwah di wilayah masing-masing di seluruh dunia, pemerintah Arab Saudi membangun universitas-universitas Islam di Arab Saudi Seperti Universitas Islam Madinah dan Ummul Qura. Terdapat dua lembaga yang menjadi penyalur donasi Saudi ke seluruh dunia, yaitu Liga Muslim Dunia atau MWL (*Muslim World League*), *Rabithah al-alam al-Islami*, dan *the World Assembly of Muslim Youth* atau WAMY. MWL memiliki sekitar 56 kantor cabang di seluruh dunia serta berafiliasi dengan sekitar 14 lembaga yang aktif membangun jaringan dan menyalurkan dana ke seluruh dunia seperti *The World Organization for Presenting Islam*, *the World Foundation for Reconstruction and Development of Mosques*, *the Islamic Fiqh Council*, *the Makkah Charity Foundation for Orphans*, dan *the International Islamic Relief Organization of Arab Saudi* (IIRO). Bagi Amerika Serikat, beberapa lembaga yang berafiliasi dengan MWL terindikasi terlibat jaringan terorisme sehingga dibekukan asetnya. *Al-Haramain Islamic Foundation*, tahun 2004 dibekukan oleh pemerintah Arab Saudi sendiri setelah lama dikritik oleh pemerintah Amerika Serikat karena keterlibatan yayasan tersebut dalam jaringan terorisme (Hasbi Anwar: 2016, Vol 1).

Salah satu program pendidikan pemerintah Arab Saudi adalah memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Arab Saudi. Jumlah Universitas Saudi yang menampung siswa asing sekitar enam Universitas. Kita ambil sebagai contoh Universitas Islam Madinah yang merupakan universitas yang jumlah mahasiswa asingnya paling dominan dibanding universitas-

universitas lainnya. Persentasenya mencapai 65% dari 140 negara. Mahasiswa Indonesia menempati urutan kedua setelah Nigeria. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai Universitas Saudi lebih kurang sekitar 800 orang. Seluruh mahasiswa asing yang belajar di Saudi setiap libur musim panas diberi tiket gratis untuk pulang ke negara mereka masing-masing. Pemerintah Arab Saudi setiap tahun memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa dari anak Indonesia sebanyak 100-170 orang. Saat ini ada sekitar 800 mahasiswa Indonesia beasiswa tersebut.

Permasalahan Pendidikan WNI di Arab Saudi

Besarnya dana pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi dan kesamaan kepentingan untuk pengembangan pendidikan Islam tidak otomatis menjadikan wilayah Arab Saudi menjadi surga pendidikan bagi warga negara Indonesia yang di sana. Ada banyak masalah yang pengkaji temukan selama kami melakukan penelitian di sana. Di mulai dari hasil pengamatan dan wawancara pada lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan perwakilan Pemerintah Indonesia yang berhasil peneliti kunjungi terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang paling dikeluhkan oleh pengelola lembaga pendidikan di Arab Saudi, diantaranya adalah: 1) Legalitas lembaga Pendidikan; 2) masalah pemenuhan dan kualifikasi guru; 3) penyediaan Gedung sarana pendidikan; 4) penyediaan buku ajar

Legalitas Lembaga Pendidikan. Dari empat lembaga pendidikan formal di Arab Saudi, yaitu Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Sekolah Indonesia Mekkah (SIM), Sekolah Indonesia Riyadh (SIR), Sekolah Darul Ulum Jeddah masing-masing belum mempunyai legalitas yang penuh yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan *calling visa* untuk penyediaan guru dari tanah air untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah Indonesia di sana. Untuk lembaga pendidikan SIJ, SIM dan SIR, masing-masing masih dalam proses dari lembaga pendidikan komunitas menuju lembaga pendidikan kedutaan (*embassy school*). Sejauh ini, untuk menghadirkan guru harus mendapatkan kafil (jaminan) dari orang yang berkewargan Arab

Saudi. Hal ini tentu saja menyebabkan posisi guru-guru sekolah tersebut menjadi sangat tergantung dengan keberadaan kafil.

Nasib yang lebih tragis dirasakan oleh lembaga pendidikan Darul Ulum di Jeddah. Lembaga pendidikan ini sebenarnya ingin menjadi lembaga pendidikan tersendiri menjadi lembaga pendidikan komunitas (*Community School*). Namun karena dianggap belum mempunyai gedung yang layak lembaga pendidikan belum diizinkan, saat ini lembaga pendidikan belum beroperasi lagi.

Sekolah Indonesia Mekah (SIM) yang dulunya adalah lembaga pendidikan komunitas yang didirikan lembaga Maarif Nahdlatul Ulama cabang Istimewa Arab Saudi, sekarang diserahkan ke KJRI untuk menjadi sekolah kedutaan. Namun hingga saat ini legalitas sebagai sekolah kedutaan masih dalam proses, sehingga semula biaya operasional masih sebagian besar dikelola oleh pengelola harian lembaga pendidikan tersebut.

Penyediaan dan Kualifikasi Guru. Dalam masalah pemenuhan guru, dari lembaga-lembaga pendidikan Indonesia di Saudi umumnya mempunyai masalah yang sama, yaitu pemenuhan guru yang tidak optimal. Para guru diambilkan dari para istri pegawai KBRI yang ke Saudi karena mengiuti pekerjaan suami. Permasalahan yang mendasar adalah guru kesulitan mendapatkan visa kerja di Arab Saudi belum berhasil membuat kesepakatan dengan pemerintah Saudi untuk berhak mengeluarkan calling visa untuk para Guru.

Dari sejumlah Sekolah Indonesia di Arab Saudi, hanya ada PNS yang sangat terbatas. Misalnya di SIJ ternyata guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya dua orang. Itu berarti sebagian besar guru di SIJ adalah honorer.

Dari sisi kementerian Agama, permasalahan pemenuhan guru juga terjadi pada penyediaan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Sejauh ini belum ada guru agama yang ditugaskan oleh kementerian Agama RI untuk melayani pendidikan agama pada sekolah di Arab Saudi. Guru agama yang ada, lebih banyak diambil dari guru lokal atau orang Indonesia yang kebetulan karena ikut suami berada di Saudi. Mereka mengajar dengan kemampuan seadanya dan belum mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG).

Penyediaan Gedung. Sedang dalam hal penyediaan Gedung Pendidikan, nampak dari lembaga pendidikan yang ada, masing-masing mengeluhkan masalahnya. Pada Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) di mana terdapat empat jenjang pendidikan yaitu TK, SD, SMP dan SMA terkonsentrasi dalam satu bangunan kecil dengan luas tanah 2100 m². Tanah seluas itu digunakan proses belajar mengajar oleh sebanyak 44 rombongan belajar (Rombel). Bisa dibayangkan bahwa proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terpaksa dilakukan secara bergantian. Untuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) saja proses KBM dilaksanakn 3 (tiga) sift.

Keadaan lebih parah dirasakan oleh Lembaga Pendidikan Darul Ulum di Jeddah. Lembaga pendidikan ini terpaksa berjalan secara kucing-kucingan karena izin operasional lembaga pendidikan ini belum dikeluarkan Pemerintah Saudi. Alasan izin operasional belum keluar, disebutkan karena lembaga pendidikan ini belum memiliki gedung yang layak. Padahal lembaga pendidikan ini mempunyai siswa sebanyak 193 anak. Sementara ini lembaga pendidikan ini sedang menunggu “vonis” pemerintah Saudi untuk bisa kembali beroperasi.

Penyediaan Buku Bahan Ajar. Salah satu permasalahan yang tidak kalah penting adalah pengadaan bahan ajar. Wawancara dengan Bapak Sinsin Rasyidin, Kepala Sekolah Indonesia Mekah (SIM), dia menyatakan bahwa sekolah-sekolah Indonesia di Arab Saudi tidak bisa bebas menerima buku ajar dari tanah air. Setiap buku yang dikirim dari Indonesia akan diseleksi secara ketat oleh pemerintah Saudi. Ini menyebabkan buku-buku yang bisa menjadi pegangan siswa hanya dalam jumlah yang terbatas. Peneliti melihat di Sekolah Indonesia Mekah (SIM) banyak fotocopy mata pelajaran di ruang Kepala Sekolah. Ketika ditanya kenapa buku-buku fotocopy semua, jawaban Kepala Sekolah di Saudi pengiriman buku-buku jadi dari Indonesia susah masuk. Sebagai jalan keluar, maka ditempuhlah cara dengan memfotocopy mata pelajaran yang berhasil di bawa WNI dari tanah air.

Untuk mengantisipasi keadaan itu, peneliti melihat para guru sekolah di Arab Saudi berkreasi menyediakan buku ajar sendiri

atau melakukan reproduksi dengan cara memfotocopy naskah buku yang dikirim via email atau buku-buku yang berhasil dibawa yang lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi. Menjadi terkesan aneh bahwa di sebuah satuan pendidikan yang dibiayai oleh negara, buku-buku pegangan murid semuanya adalah fotocopy. Apa itu tidak dianggap pelanggaran hak cipta? Tapi apa boleh buat, bagi para guru Sekolah Indonesia di Arab Saudi tidak ada pilihan lain yang bisa mereka lakukan.

Standarisasi Layanan Pendidikan dan Implikasi Layanan Pendidikan Arab Saudi

Dari paparan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa fakta layanan pendidikan bagi WNI di Arab Saudi akan menghasilkan paling tidak dua jenis produk pendidikan dari layanan pendidikan. Pertama, produk layanan pendidikan yang tidak standar, atau dengan kata lain agak jauh bayangan lulusan pendidikan formal di Arab Saudi akan mempunyai keunggulan dan daya saing tertentu. Satu hal yang unggul barangkali karena anak-anak yang belajar di sana sudah terbiasa dengan Bahasa Arab. Walau tidak mesti orang yang paham Bahasa Arab di sana akan menjadi ahli agama. Akibat kurang standarnya layanan pendidikan di Arab Saudi, maka para orang tua dari WNI harus melakukan usaha ekstra agar putra-putri mereka pulang ke Indonesia dengan kelebihan tertentu.

Kedua, produk layanan pendidikan atau lulusan lembaga pendidikan yang diwarnai dan dipengaruhi oleh paham yang dianut pemerintah Arab Saudi. Menurut salah satu Mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Madinah, mereka tidak menampik bahwa alumni mahasiswa Saudi cenderung mengajarkan pendekatan keagamaan yang bernuansa puritan, salafi, bahkan wahabi. Hal itu tidak terhindarkan karena program studi disesuaikan dengan arah dan ideologi yang dikembangkan pemerintah setempat.

1. Standarisasi Layanan Pendidikan

Pada kasus produk layanan pendidikan yang tidak standar sudah jamak memerlukan berbagai pendekatan sebagaimana pendidikan yang berada di daerah-daerah yang terbatas seperti di dalam negeri. Karena itu, dalam

tulisan ini pembahasan lebih diarahkan pada implikasi terkait paham keagamaan yang diakibatkan oleh produk pendidikan yang diselenggarakan di Arab Saudi.

Ada kesan peneliti bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini belum optimal memberikan layanan pendidikan pendidikan bagi warga Indonesia di Arab Saudi. Berbagai permasalahan masih banyak menghinggap pelaksanaan layanan pendidikan bagi WNI di luar negeri. Legalitas lembaga pendidikan Indonesia yang belum jelas, pemenuhan guru yang masih berbelit, gedung-gedung pendidikan yang masih terkesan darurat dan penyediaan buku ajar yang terpaksa kucing-kucingan menunjukkan diplomasi Indonesia dengan pemerintah Saudi masih menyimpan masalah. Sekolah Indonesia Jeddah yang memiliki murid terbanyak saja tidak didukung sarana prasana yang memadai. Gedung sekolah yang sebenarnya hanya berkapasitas 600 siswa dipaksa digunakan untuk melayani 1400 siswa menjadi contoh kongkrit betapa mendesaknya penyelesaian beberapa masalah di bidang pendidikan.

Selain itu, terkait dengan warna keagamaan yang mungkin timbul dari model dan pilihan paham keagamaan yang dikembangkan Pemerintah Saudi, Pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menjaga timbulnya ekses yang kontra produktif dengan pengembangan Islam moderat dan rahmatan lil alamin. Banyaknya jumlah mahasiswa Indonesia yang menerima bantuan beasiswa dari Pemerintah Arab Saudi akan menjadi masalah tersendiri apabila sarjana agama yang dihasilkan pendidikan tinggi di Saudi berbeda warna keagamaan yang diharapkan.

Untuk mengatasi semua permasalahan di atas pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri perlu segera bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Beberapa langkah darurat perlu segera diambil untuk kepentingan pemenuhan layanan pendidikan untuk anak bangsa dan kepentingan lahirnya agamawan dan ilmuwan yang memajukan martabat bangsa.

Dari kajian ini, peneliti merumuskan berapa pemikiran dan solusi yang kami rumuskan dalam empat pokok masalah, yaitu :

Layanan Pendidikan pada Sekolah Formal, Layanan Pendidikan Keagamaan, Layanan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dan Perlunya rintisan madrasah khas Indonesia di Luar negeri.

Layanan Pendidikan pada Sekolah Formal. Dari beberapa masalah yang terdapat pada pendidikan formal tingkat dasar dan menengah penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah-sekolah Indonesia yang terkait dengan fungsi kementerian agama adalah penyediaan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan kualifikasi kompetensi GPAI. Dari sekolah-sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi, Kementerian Agama hingga saat ini belum mempunyai kewenangan untuk memanggil SDM guru dan tenaga kependidikan dari Indonesia. Demikian juga izin operasi^{um} mengirimkan GPAI atau melakukan sertifikasi atau yang sekarang melakukan Ujian Kompetensi Guru (UKG) bagi guru agama yang ada.

Untuk itu, Kementerian Agama perlu segera mendiskusikan dan membuat kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terlibat dalam penguatan layanan pendidikan di Saudi ini. usaha ini dianggap mendesak mengingat Kementerian Agama belum banyak berbuat untuk layanan pendidikan di luar negeri.

Layanan Pendidikan Keagamaan. Penyelenggaraan lembaga TPA An Nasiriyah yang berlokasi di Jeddah menjadi gambaran riil layanan pendidikan keagamaan di Arab Saudi. TPA ini mengontrak sebuah bangunan lama dengan kondisi yang tidak ideal. Nampak betul pengelola lembaga pendidikan tersebut berharap pada Jakarta agar Kementerian Agama RI turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dan memastikan lancarnya layanan pendidikan keagamaan di tempat itu. Saat ini, TPA An Nasiriyah menghadapi permasalahan belum jelasnya dasar hukum penyelenggaraan kegiatan TPA An Nasiriyah. TPA An Nasiriyah belum mempunyai izin operasional. Akibatnya para pengelola merasa was-was dengan ketidakjelasan izin operasional ini. selain itu gedung yang digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga berstatus sewa yang tidak murah.

Terkait masalah ini, Kementerian Agama perlu melakukan negosiasi dengan

Kementerian Pendidikan Saudi untuk memperjelas payung hukum atau izin operasional kegiatan TPA An Nasiriyah. Selain itu perlunya juga standarisasi proses Belajar Mengajar sebagaimana Pendidikan Diniyah atau Pendidikan Diniyah Takmiliah atau juga Diniyah Formal sebagaimana digagas di Tanah Air. Kejelasan status hukum dan kejelasan standar yang menjadi rujukan akan memperjelas keberadaan lembaga Pendidikan An Nasiriyah di Jeddah ini.

Bantuan penyediaan gedung untuk Nasiriyah menjadi masalah kemudian yang bisa dipikirkan dan dialokasikan setelah kedua masalah sebelumnya (legalitas lembaga dan standar pembelajaran) teratasi. Penyediaan sarana prasarana berupa Gedung bisa diatasi dengan dana kementerian dan sebagian dari dana masyarakat WNI di Saudi.

Layanan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi . Ketika Pemerintah Saudi di bidang pendidikan cenderung mengembangkan paham agama sesuai dengan ideologi penguasa yang puritan dan memberikan bantuan beasiswa kepada calon mahasiswa Indonesia dalam jumlah yang banyak, maka seyogyanya Kementerian Agama terlibat dalam proses rekrutmen calon perguruan tinggi di Saudi. Hal ini dibutuhkan mengingat peran Kementerian Agama sangat berkepentingan untuk pembangunan di bidang agama yang berkeindonesiaan.

Selain itu, Kementerian Agama perlu terus mendampingi keberadaan mahasiswa di Saudi ini untuk turut terlibat dalam pembangunan NKRI dengan mengembangkan cara pandang agama yang moderat dalam mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Perlunya Rintisan Madrasah khas Indonesia di Luar Negeri. Belajar dari beberapa negara di Asean seperti Philipina, dan India yang telah berhasil membuka sekolah Internasional di Saudi Arabiya, maka ada harapan bahwa Indonesia seyogyanya mempunyai sekolah internasional juga. Hal ini didasarkan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang sebagian warganya ada di banyak negara. Belum lagi Indonesia dengan paham keagamaan yang moderat diharapkan mengembangkan paham moderat itu ke dunia internasional di tengah opini bahwa sebagian

orang yang mengaku muslim melakukan kekerasan kemanusiaan.

Diakui memang bahwa harapan itu untuk saat ini masih terkesan jauh dari pada panggang api. Masih banyak permasalahan pendidikan di dalam negeri yang belum tertangani, seperti masalah pemerataan pendidikan dan mutu, apalagi bila ditambah dengan agenda membuat lembaga pendidikan internasional di luar negeri. Belum lagi pertanyaan: siapa seharusnya yang mengagas sekolah Islam internasional di luar negeri? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Apabila harapan itu ditujukan kepada Kemendikbud RI tentu yang digagas bukanlah sekolah Islam internasional, namun lebih pas adalah sekolah Internasional Indonesia, tanpa embel-embel Islam.

Mungkin di sinilah peran strategis kementerian agama diharapkan hadir. Dengan alokasi anggaran yang memperhitungkan jumlah umat beragama yang dilayani, maka anggaran untuk layanan pendidikan agama dan keagamaan untuk Islam bisa dijadikan pos sumber anggaran untuk mewujudkan harapan itu. Walaupun kalau dihadapkan tuntutan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam di dalam negeri, mewujudkan sekolah Islam internasional itu samar-samar masih terkesan ambisius.

Namun diantara berbagai idealita yang dipasangkan pada sebuah keadaan, pasar selalu punya gerakan sendiri. Mimpi mempunyai sekolah Islam internasional dalam konteks layanan pendidikan di Arab Saudi juga sebuah harapan yang realistik. Bagaimana tidak, umat Islam Indonesia membayangkan bahwa Arab Saudi adalah pusat Islam dunia, dari sana diharapkan lahir ulama-ulama berkelas internasional. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berpeluang membangun dialog dan kerjasama untuk tujuan tersebut.

2. Implikasi Layanan dalam aspek lainnya (Paham Keagamaan)

Secara umum layanan pendidikan di Arab Saudi memberikan pengalaman bagi anak-anak WNI untuk mengenal budaya dan sosiologi masyarakat Arab Saudi. Peserta didik yang kebetulan anak-anak WNI akan akrab dengan literature dengan menggunakan bahasa Arab mengingat bahasa arab sering digunakan

dalam komunikasi sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini sangat membantu para siswa dalam mengenal literature berbahsa Arab. Manfaat yang lain, mengingat pendekatan kebijakan pendidikan pemerintah Arab Saudi yang cenderung mengajarkan agama Islam dari sumber aslinya (al-Qur'an dan al Hadits) , maka banyak peserta didik terbawa untuk mengikuti pola pendekatan yang digunakan seperti kebiasaan menghafal al Qur'an dan hadits-hadits tertentu dalam jumlah yang tidak sedikit.

Hanya saja, selain aspek positifnya, pendidikan di Arab Saudi juga membawa warna tertentu dalam paham keagamaan. Sesuai dengan kecenderungan paham keagamaan kerajaan Arab Saudi yang menganut wahabiyah, maka para peserta didik dari Indonesia tidak sedikit yang mengikuti paham ini. Paham Wahabiyah oleh beberapa kalangan dinilai mempunyai kelemahan mendasar karena dalam melihat permasalahan keagamaan sering memandang secara dikotomis hitam putih. Hal ini mengakibatkan lahirnya sikap umat yang mudah memberikan penilaian sepihak atas segala sesuatu dan mudah sekali umat melihat pihak lain sebagai bid'ah, sesat bahkan tidak memungkinkan mengkafirkan. Hal ini tentu saja kurang cocok bagi kemajemukan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Hasbi Anwar menyebutkan bahwa Keberadaan pemikiran Salafi-Wahabi serta penyebarannya di Indonesia adalah hasil dari politik luar negeri Arab Saudi. Dakwah Islam merupakan salah satu prioritas dari misi politik Kerajaan Arab Saudi sehingga Arab Saudi menggelontorkan banyak dana untuk menyukseskan dakwah Islam di seluruh dunia. Namun, dakwah Islam yang disebarkan oleh Arab Saudi memiliki kekhasan tersendiri, yakni berasas pada manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal sebagai aliran Salafi-Wahabi. Aliran ini oleh banyak kalangan dianggap mengajarkan paham-paham ekstrimisme dan radikalisme serta sangat eksklusif dalam beragama (Hasbi Anwar: 2016, Vol 1).

Terkait dengan kemungkinan paham yang dibawa para alumni perguruan Tinggi di Arab Saudi sekarang ini perlu banyak pencermatan. Kalau dulu belajar di Saudi mempunyai kebebasan seluas-luasnyasehingga

melahirkan ulama-ulama terkenal yang berfaham ahlu sunnah wal jamaah yang mempunyai kearifan lokal, maka sekarang seiring dengan kebijakan politik yang ketat dan ideologi pemerintah Saudi yang cenderung puritan, maka kemunculan ulama menjadi terbatas dan ulama yang dihasilkan Arab Saudi yang terkesan membawa paham puritan. Banyak program yang dibuat pemerintah Arab Saudi disusun dalam rangka mengembangkan Islam dengan warna ideologi yang dimiliki pemerintah Saudi.

Salah satu program pendidikan pemerintah Arab Saudi adalah memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai negara Islam dan negara yang minoritas muslim untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Arab Saudi. Jumlah Universitas Saudi yang menampung siswa asing sekitar enam Universitas. Kita ambil sebagai contoh Universitas Islam Madinah yang merupakan universitas yang jumlah mahasiswa asingnya paling dominan dibanding universitas-universitas lainnya. Persentasenya mencapai 65% dari 140 negara. Mahasiswa Indonesia menempati urutan kedua setelah Nigeria.

Bayangkan di masa depan, dengan banyaknya sarjana Indonesia yang dibiayai pemerintah Arab Saudi, maka Indonesia akan dibanjiri sarjana dari negeri ini. sarjana dengan kultur keagamaan yang berbeda dengan warna ulama yang dibutuhkan di tanah air, yaitu ulama yang mempunyai kearifan tinggi, sadar dengan perbedaan budaya dan faham dengan kepentingan menjaga NKRI. Ulama dengan warna Saudi yang berkembang dari paham puritan dan wahabi terkadang terjebak dakwah agama yang lebih banyak melakukan upaya menyesatkan orang lain (tadhili), Menganggap bid'ah praktek budaya dan keagamaan orang lain (tabdi'i), dan ada juga yang sampai melakukan pengkafiran terhadap orang lain (takfiri).

Untungnya tidak semua alumni perguruan Tinggi Arab Saudi berfikir salafi, contohnya KH Said Aqil Siradj yang alumni Universitas Madinah, yang sekaligus Ketua Umum PBNU ini, dalam sebuah acara yang digelar oleh salah satu Pengurus Wilayah GP Ansor di kawasan Sumatera, justru dengan tegas mengatakan bahwa Wahabisme merupakan ancaman yang cukup berbahaya

bagi kelangsungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Meskipun kaum Wahabis bukan termasuk teroris, namun Wahabisme, menurut alumnus Pesantren Lirboyo ini, telah menyediakan landasan teologis yang cukup kuat bagi munculnya aksi-aksi terorisme di berbagai belahan bumi ini.¹²

Untuk itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian Agama RI terkait berkembangnya paham salafi-wahabi dan meningkatnya animo calon mahasiswa untuk studi di Arab Saudi perlu melakukan langkah khusus. Beberapa langkah dan program perlu dilakukan dalam rangka mengontrol eksese negative dari bantuan pendidikan yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi. misalnya dengan melakukan pendampingan tertentu dalam seleksi mahasiswa penerima beasiswa melalui Kementerian Agama. Usaha ini bertujuan untuk memberi pembekalan serta penyadaran kebutuhan ulama di tanah air. Demikian juga nanti kalau para sarjana dari Saudi ini sudah kembali, maka kementerian agama perlu melibatkan mereka dalam pembangunan agama dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di samping itu, pemerintah Indonesia perlu memperbanyak pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah di luar Arab Saudi dan negara-negara yang berkecenderungan wahabi seperti Pakistan dan Afganistan. Dalam hal ini negara Mesir dan Turki bisa menjadi alternative. Mukani menyebutkan bahwa banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al Azhar menjadi salah satu factor kebangkitan Islam Indonesia. Menurutnya, banyaknya penduduk Indonesia yang menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo, yang dianggap sebagai poros utama para tokoh reformasi muslim untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai perubahan jaman modern sekaligus merangkaikan perubahan itu dengan berbagai ketentuan pokok ajaran agama Islam (Mukani, 2012). Di sini pula, mereka tidak hanya belajar agama tetapi juga ilmu politik dan pemikiran pembaharuan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh

¹²Ahmad Shidqi, Respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Wahabisme dan Implikasinya bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Islam.: Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434

Muhammad Abduh. Ini memberi warna lain pembaharuan Islam Indonesia, yaitu pembaharuan yang tidak semata-mata diwarnai puritanisme, tetapi juga modernisasi pemikiran. Alumni Mesir yang agak moderat diharapkan bisa mengimbangi para alumni dari negara Arab Saudi, ketika nantinya berkiprah kembali dalam pengembangan Islam di Indonesia.

PENUTUP

Dari Kajian ini, ada beberapa catatan kesimpulan yang perlu digarisbawahi: pertama, ada banyak permasalahan yang masih menghinggapi pelaksanaan layanan pendidikan bagi WNI di Arab Saudi baik layanan yang diberikan pemerintah Indonesia di sana maupun oleh pemerintah Saudi sendiri. Permasalahan itu diantaranya Legalitas lembaga pendidikan Indonesia yang belum jelas, pemenuhan guru yang masih belum memenuhi standar dan berbelit, gedung-gedung layanan pendidikan yang masih terkesan darurat dan penyediaan buku ajar yang kurang berkualitas. Banyaknya permasalahan ini menunjukkan diplomasi Indonesia dengan pemerintah Saudi masih menyimpan banyak masalah. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi pemerintah di bidang pendidikan di Arab Saudi belum optimal.

Kedua, kebijakan pendidikan di Arab Saudi cenderung kaku sehingga dalam beberapa hal menyulitkan pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan agama dan keagamaan secara optimal. Di samping itu kecenderungan kebijakan pendidikan yang dikembangkan pemerintah Arab Saudi yang cenderung mengajarkan paham keagamaan yang puritan, salafi dan wahabi dikhawatirkan tidak sejalan dengan model pembangunan agama yang digagas di Indonesia yang mengharapkan Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin.

Untuk itu penelitian ini merekomendasikan: 1) Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Luar negeri segera duduk bersama untuk membahas permasalahan dan mengambil langkah-langkah cepat untuk pemenuhan layanan pendidikan secara

memadai; 2) Kementerian Agama perlu segera merumuskan langkah untuk menjawab permasalahan pemenuhan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan kualifikasi yang dibutuhkan (konteks layanan pendidikan formal); melakukan advokasi dan standarisasi pendidikan keagamaan (konteks layanan pendidikan nonformal); melakukan pendampingan dalam rekrutmen calon mahasiswa perguruan tinggi di Arab Saudi dan pelibatan alumninya dalam pembangunan NKRI (konteks layanan pendidikan tinggi); dan memikirkan kemungkinan kementerian Agama menggagas madrasah di luar negeri dengan mengambil piloting di Arab Saudi (Konteks pendidikan madrasah berkeunggulan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih setinggi-tingginya kepada Kepala Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama Jakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: Kepala Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Darmakirty Syailendra (Kepala Konjen RI di Jeddah), Masduki (Direktur Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Ely Maliki (Kepala Sekolah Darul Ulum), Sinsin Rasyidin (Kepala Sekolah Indonesia Mekah, santri-santri Rubath Al Jawi Misfalah dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Hasbi. (2016). Politik Luar Negeri Arab Saudi Dan Ajaran Salafi-Wahabi Di Indonesia. *Jisiera: The Journal Of Islamic Studies And International Relations*. Volume 1, Agustus.
- Artikel. (2015). *1,3 Juta TKI Kerja di Timteng, Terbanyak Arab Saudi*. <http://finance.detik.com/read>.
- Hasan, Noorhaidi. (2005). Laskar Jihad Islam, Militancy and The Quest for Identity in Post-New Order Indonesia. *Ph.D. Dissertation*. Utrecht University.
- Hidayat, Dady. (2012). Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 17 No. 2, juli.

- Irham. (2016), Pesantren Manhaj Salafi: Pendidikan Islam Model Baru Di Indonesia. *Ulul Albab*, Volume 17, No.1.
- Mukani. (2016). Ulama Al-Jawwi di Arab Saudi Dan Kebangkitan Umat Islam di Indonesia. *AL MURABBI*, Volume 2, Nomor 2, Januari.
- Nurhasyim. (2004). SESPANAS LAN
- Shidqi, Ahmad (2013). Respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Wahabisme dan Implikasinya bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 1, Juni.
- Wahab, Muhibb Abdul. (2015). *Masa Depan Bahasa Arab di Indonesia*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28591>
- Wawancara dengan Darmakirty Syailendra, Kepala Konjen RI di Jeddah, pada tanggal 6 Desember 2015.
- Wawancara dengan Masduki, Direktur Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) pada tanggal 6 Desember 2015.
- Wawancara dengan ibu Ely Maliki, Kepala Sekolah Darul Ulum Jeddah pada tanggal 6 Desember 2015.
- Wawancara dengan Bapak Sinsin Rasyidin, Kepala Sekolah Indonesia Mekah (SIM) pada tanggal 8 Desember 2015
- Hasil Forum Group Discussiun (FGD) dengan santri-santri Rubath Al Jawi Misfalah seperti Ahmad Ridho dkk. tanggal 8 Desember 2015.
- Zainudin, Ahmad. (2008). *Perbandingan Pendidikan Antara Arab Saudi Dan Pakistan*. <http://datarental.blogspot.com/2008/04/perbandingan-pendidikan-antara-saudi.html>.